Katalog BPS : 9205.21.03

PENDAPATAN REGIONAL KABUPATEN NATUNA 2006-2010

http://natuna.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NATUNA

PENDAPATAN REGIONAL MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010

Katalog BPS	**: 9205.21.03**
No. Publikasi	**: 21030.0802**
Ukuran Buku	**: 16 cm x 21 cm**
Jumlah Halaman	**: vi + 83**
Naskah	**: BPS Kabupaten Natuna**
Penyunting	**: Seksi Neraca Wilayah & Analisis Statistik**
Diterbitkan Oleh	**: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna**

http://natunakab.bps.go.id

"Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya"

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA

KATA PENGANTAR

Publikasi "**Pendapatan Regional Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha, 2010**" ini merupakan hasil publikasi BPS Kabupaten Natuna. Berbagai informasi disajikan untuk merumuskan kebijakan pembangunan suatu daerah diberbagai bidang, terutama dibidang ekonomi sangat memerlukan indikator dan informasi makro.

Secara makro, publikasi ini dibahas mengenai kondisi perekonomian di Kabupaten Natuna pada tahun 2010. Sebagai pelengkap ditampilkan pula data tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan data dan ulasan yang ditampilkan dalam buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan kebijakan, khususnya kebijakan ekonomi.

Agar pengguna data dapat memanfaatkan sebaik mungkin publikasi ini, maka di samping angka-angka yang disajikan dalam bentuk tabel disertakan pula konsep/defenisi yang digunakan dalam penghitungan.

http://natunakab.bps.go.id

Saran dan kritik, untuk meningkatkan kualitas publikasi ini di masa mendatang sangat kami harapkan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Natuna

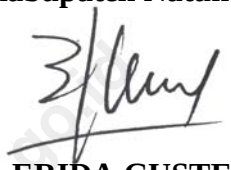

Dra.ERIDA GUSTETY
NIP. 196508061993032001

http://natunakab.bps.go.id

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Kepala BPS Kabupaten Natuna i
Daftar Isi iii

BAB I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 2

BAB II Metodologi 5
2.1 Konsep dan Definisi 5
2.2 Metode Penghitungan PDRB 6
2.3 Metode Penghitungan PDRB Sektoral 15
2.4 Cara Penyajian dan Angka Indeks 25
2.5 Keterbatasan Masalah 28

BAB III Uraian Sektoral 30
3.1 Sektor Pertanian 30
3.2 Sektor Pertambangan & Penggalian 32
3.3 Sektor Industri Pengolahan 33
3.4 Sektor Listrik, Gas & Air 35
3.5 Sektor Konstruksi 36
3.6 Sektor Perdagangan, Hotel &

http://natunakab.bps.go.id

Restoran 37
3.7 Sektor Pengangkutan & Komunikasi..... 39
3.8 Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 42
3.9 Sektor Jasa-Jasa 45

BAB IV Tinjauan Pendapatan Regional 48
4.1 Pertumbuhan Ekonomi 49
4.2 Struktur Ekonomi 57
4.3 PDRB dan Pendapatan Per Kapita 60

BAB V Perbandingan Indikator Ekonomi Antar Region 64
5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 64
5.2 Kontribusi PDRB 67
5.3 PDRB dan pendapatan per Kapita 69

Lampiran Tabel Pokok 73

http://natunakab.bps.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah, memerlukan bermacam data sebagai dasar penentuan strategi dan kebijakan agar sasarannya dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang telah diambil pada masa yang lalu perlu di monitor dan dilihat hasil-hasilnya. Sehingga diharapkan akan membawa masyarakat menuju pada kehidupan ekonomi maupun sosial yang lebih baik dan manusiawi. Perencanaan pembangunan ekonomi yang baik memerlukan berbagai ragam data statistik sebagai bahan masukan untuk menentukan arah dan kebijakan, serta menetapkan sasaran pembangunan agar tercapai dengan baik.

Hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai di masa lalu perlu ditelaah dan dinilai manfaat serta implikasinya untuk pembangunan masa kini dan masa datang. Terlebih lagi dengan

semakin pesat dan meluasnya kegiatan pembangunan yang dilakukan di era otonomi daerah. Hal ini membutuhkan data statistik baik yang bersifat makro maupun mikro di tingkat nasional dan regional.

Untuk memenuhi salah satu kebutuhan data ekonomi makro di tingkat regional seperti mengetahui gambaran kondisi kesejahteraan penduduk diperlukan suatu alat ukur berupa indikator statistik. BPS Kabupaten Natuna berupaya melakukan penghitungan kesejahteraan tersebut dengan menggunakan indikator Pendapatan Regional yang merupakan salah satu turunan dari statistik Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) secara berkala. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang ekonomi yang telah dilakukan di Kabupaten Natuna dapat dievaluasi hasilnya, dan selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan untuk masa mendatang.

http://natunakab.bps.go.id

1.2. Maksud dan Tujuan

Adanya perencanaan pembangunan ekonomi pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

penduduk/masyarakat. Secara luas, interprestasi kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan kualitas hidup, pembagian distribusi pendapatan yang merata, perluasan kesempatan kerja, dan pergeseran aktivitas sektoral perekonomian. Untuk menggambarkan hal tersebut dibutuhkan data statistik yang spesifik, guna mengevaluasi hasil-hasil pembangunan ekonomi.

Penyusunan publikasi *Pendapatan Regional Kabupaten Natuna menurut Lapangan Usaha, 2010* dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna merupakan salah satu hasil pengolahan kegiatan statistik dasar yang disajikan secara series memberikan gambaran kinerja ekonomi makro dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian regional akan lebih jelas. Publikasi ini merupakan kelanjutan dari penerbitan seri-seri sebelumnya, yang disajikan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

http://natunakab.bps.go.id

2. PDRN harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu wilayah.

3. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

4. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menujukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

5. PDRB dan PDRN atas dasar biaya faktor produksi per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PDRN setiap kepala atau per satu orang penduduk.

6. PDRB dan PDRN atas dasar biaya faktor produksi per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

http://natunakab.bps.go.id

BAB II

METODOLOGI

2.1 Konsep dan Definisi

Berikut ini dijelaskan istilah yang berhubungan dengan PDRB antara lain: output, biaya antara dan nilai tambah bruto. Kejelasan pengertian dari tiga istilah tersebut sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan PDRB. Selain hal tersebut, pada bab ini juga dijelaskan mengenai pendekatan penghitungan PDRB.

a. Output

Output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Pada dasarnya nilai output diperoleh dari perkalian antara kuantum produksi dan harganya.

b. Biaya Atara

http://natunakab.bps.go.id

Biaya antara terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi oleh unit-unit produksi domestik pada rentang waktu tertentu (biasanya satu tahun).

c. Nilai Tambah Bruto

Nilai tambah bruto merupakan selisih antara nilai output dengan biaya antaranya atau apabila dirumuskan menjadi: Nilai Tambah Bruto = Output - Biaya Antara. Pengertian konsep nilai tambah bruto sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan PDRB, yang tidak lain merupakan penjumlahan seluruh besaran nilai tambah bruto dari seluruh unit produksi pada wilayah tertentu dan dalam rentang waktu tertentu.

2.2 Metode Penghitungan PDRB

2.2.1 Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Dalam menyajikan statistik pendapatan regional atas dasar harga berlaku terdapat 2 (dua) metode yang digunakan metode langsung dan metode tak langsung.

http://natunakab.bps.go.id

a. Metode Langsung

Metode langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah/wilayah yang bersangkutan, tidak termasuk data yang diperoleh dari angka nasional atau daerah/wilayah lain. Pada prinsipnya metode langsung ini menggunakan tiga macam pendekatan :

(1) Pendekatan Produksi

(2) Pendekatan Pendapatan

(3) Pendekatan Pengeluaran

(1) Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi dilakukan bila tersedia data produksi dari masingmasing sektor. Nilai tambah (*value added*) barang dan jasa yang diproduksi dihitung dengan cara mencari selisih nilai produksi (*output*) dengan biaya antara (*intermediate Cost*). Nilai tambah tersebut akan sama dengan balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. Pendekatan ini

http://natunakab.bps.go.id

umumnya digunakan terhadap kegiatan-kegiatan produksi yang berbentuk barang/komoditi. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel, Restoran.
7. Angkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Sewa, Jasa Perusahaan.
9. Jasa-jasa.

(2) Pendekatan Pendapatan

Perkiraan nilai tambah dengan pendekatan pendapatan adalah dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor-faktor produksi (upah/gaji, surplus usaha) termasuk juga penyusutan dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Di dalam surplus usaha termasuk bunga modal neto

http://natunakab.bps.go.id

(selisih bunga yang diterima dengan bunga yang dibayarkan) sewa tanah dan keuntungan (profit). Di dalam sektor-sektor yang tidak mencari untung (non profit making) termasuk sektor pemerintahan, surplus usahanya tidak diperhitungkan, karena outputnya berupa pelayanan kepada masyarakat yang produksinya jasa (sektor pemerintahan). Hal tersebut dilakukan karena tidak tersedianya/kurang lengkapnya data produksi dan biaya antara.

3) Pendekatan Pengeluaran

Perkiraan nilai tambah berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah dengan cara menghitung penggunaan akhir dari barang-barang dan jasa yang diproduksinya. Secara makro penggunaan akhir dari barang /jasa tersebut digunakan untuk :

a. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga.
b. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta yang Tidak Mencari Untung (Lembaga Nirlaba).
c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.
d. Pembentukan Modal Tetap Bruto.
e. Perubahan Stok.
f. Ekspor Neto (Ekspor-Impor).

http://natunakab.bps.go.id

Dari tiga pendekatan penghitungan tersebut, secara konsep seyogyanya jumlah pengeluaran tadi harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya. Selanjutnya produk domestik regional bruto yang telah diuraikan di atas disebut sebagai produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar, karena mencakup komponen pajak tidak langsung neto.

b. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung merupakan penghitungan dengan cara menggunakan data yang bersumber dari luar daerah/wilayah yang bersangkutan, seperti data nasional. Perkiraan dilakukan berdasarkan alokasi dengan mengalokasikan data tersebut ke daerah yang bersangkutan, yaitu menggunakan alokator yang cocok dengan sektor/kegiatan masing-masing. Metode tidak langsung ini sedapat mungkin dihindari, karena dalam praktek perhitungan PDRB, metode ini sangat jarang dilakukan karena mengandung banyak kelemahan.

https://natunakab.bps.go.id

Di samping itu sebagai salah satu indikator dari data PDRB dapat juga diturunkan beberapa indikator ekonomi penting lainnya, seperti :

1. **Produk Regional Bruto**, yaitu PDRB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk suatu wilayah yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di suatu wilayah.

2. **Produk Regional Neto atas dasar harga pasar,** yaitu PDRB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu tahun.

3. **Produk Regional Neto atas dasar biaya faktor produksi**, yaitu produk regional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan

http://natunakab.bps.go.id

terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, produk regional neto atas dasar harga faktor produksi disebut sebagai Pendapatan Regional.

4. Angka-angka perkapita, yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

2.2.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Angka-angka pendapatan regional atas dasar harga konstan 2000 sangat penting untuk melihat perkembangan riil dari tahun ke tahun bagi setiap agregat ekonomi yang diamati. Agregat yang dimaksud tersebut dapat merupakan produk domestik regional bruto secara keseluruhan, nilai tambah sektoral (PDRB sektoral) ataupun komponen penggunaan produk domestik regional bruto. Pada dasarnya dikenal empat cara untuk memperoleh nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan. Masing-masing cara tersebut diuraikan berikut ini.

a. Revaluasi

http://natunakab.bps.go.id

Dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar 2000 dan hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan 2000. Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil penghitungan di atas. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya yang digunakan, karena mencakup komponen yang terlalu banyak di samping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan 2000 biasanya diperoleh dari perkalian output atas dasar harga konstan 2000 masing-masing tahun dengan ratio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

b. Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan atau indeks dari

http://natunakab.bps.go.id

berbagai indikator produksi, seperti: jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang dihitung. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap penghitungan output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan ratio tetap nilai tambah atas dasar harga konstan yang sama. Ratio tersebut diperoleh dari survei khusus (SKPR).

c. Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan Indeks Harga Konsumen atau Indeks Harga Perdagangan Besar.

d. Deflasi Berganda

Dalam metode deflasi berganda ini yang dideflasikan adalah output dan biaya antaranya; selanjutnya nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan Indeks Harga Produsen atau

http://natunakab.bps.go.id

Indeks Harga Perdagangan Besar sesuai dengan cakupan komoditinya.

Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, di samping karena komponennya terlalu banyak juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan 2000, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

2.2.3 PDRB PerKapita

Bila PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal diwilyah/daerah ini maka diperoleh suatu nilai PDRB Per-Kapita sedangkan Pendapatan Regional perkapita adalah PDRN atas dasar harga biaya factor produksi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah/daerah tersebut.

2.3 Metode Penghitungan PDRB Sektoral

Tanaman Bahan Makanan

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah melalui pendekatan produksi. Secara umum nilai output diperoleh

http://natunakab.bps.go.id

dengan cara mengalikan seluruh produksi yang dihasilkan dari subsektor-subsektor pertanian terhadap harga produsennya.

Nilai tambah bruto ini diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap komoditi. NTB didapat dari pengurangan nilai output atas dasar harga produsen terhadap seluruh biaya antara yang dalam prakteknya biasa dihitung melalui perkalian antara rasio NTB terhadap output komoditas tertentu. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan tahun 2000 menggunakan metode revaluasi.

Tanaman Perkebunan

Output atas dasar harga berlaku subsector ini diperoleh dengan cara mengalikan produksi dengan harga padatahun yang bersangkutan, kemudian dikurangi dengan biaya pengangkutan dan margin perdagangan. Biaya transport dan margin perdagangan didapat dari survey khusus. Sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi.

Peternakan dan Hasil-hasilnya

Subsektor ini mencakup kegiatan pemeliharaan segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembang biakkan,

http://natunakab.bps.go.id

dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya baik dilakukan oleh rakyat maupun perusahaan peternakan. Untuk penghitungan output dan nilai tambah sama seperti subsektor sebelumnya.

Kehutanan

Penghitungan output dan nilai tambah subsector ini sama seperti penghitungan subsector sebelumnya, yaitu penghitungan atas dasar harga berlaku menggunakan metode produksi dan penghitungan atas dasar harga konstan menggunakan revaluasi.

Perikanan

Subsektor ini mencangkup semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainya baik berada diair tawar maupun air asin. Penghitungan nilai tambah bruto ini dilakukan dengan mengalikan rasio nilai tambah bruto terhadap output. Rasio nilai tambah diperoleh dari survey.

Pertambangan Tanpa Migas

Meliputi pengambilan dan persiapan pengolahan lanjutan benda padat, baik di bawah maupun di atas permukaan bumi serta seluruh kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memanfaatkan bijih logam dan hasil tambang lainnya. Penghitunganya sama dengan

http://natunakab.bps.go.id

menggunakan metode produksi dan untuk memperoleh NTB ditempuh dengan cara revaluasi ditambah dengan survey khusus.

Penggalian

Mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian yang umumnya berada di permukaan bumi. Pendekatan penghitungan diperoleh dari perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan output tersebut dengan rasio NTB terhadap output masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan metode revaluasi.

Industri Pengolahan

Metode penghitungan digunakan adalah pendekatan produksi, yaitu nilai tambah diperoleh dari output dikurangi dengan biaya antara. Output kegiatan industry dapat berbentuk barang dan jasa atau keduanya.

Listrik

http://natunakab.bps.go.id

NTB harga berlaku diperoleh dari perkalian produksi dengan harga yang berlaku pada masing-masing tahun, sedangkan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara deflasi.

Air Bersih

Data produksi, harga dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan air minum diperoleh dari laporan dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan menggunakan persentase nilai tambah terhadap output masing-masing tahun.

Bangunan

Output diperoleh dari penjumlahan semua kegiatan pembangunan, fisik konstruksi, dan perbaikan baik berupa gedung, jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, maupun jaringan listrik, air, telepon. Persentase NTB diperoleh dari survey khusus. Sedangkan harga konstan diperoleh dengan cara deflasi.

Perdagangan

http://natunakab.bps.go.id

Nilai produksi bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan mengalikan rasio dari survey khusus dengan output atas dasar harga konstan dari sector-sektor pertanian, pertambangan, dan penggalian, industry serta import. Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan konstan dihitung berdasarkan perkalian rasio nilai tambah dan outputnya.

Hotel

Nilai tambah bruto subsector hotel ini dapat diperoleh dengan pendekatan produksi. Indikatornya adalah jumlah malam kamar, jumlah tempat tidur, jumlah hotel atau tempat penginapan, jumlah tenaga kerja, dan jumlah tamu yang menginap.

Restoran

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi, menggunakan indeks harga konsumen makanan jadi dan minuman sebagai deflator.

Angkutan Jalan Raya

Menggunakan pendekatan produksi yang didasarkan pada data jumlah armada angkutan umum barang dan penumpang wajib

http://natunakab.bps.go.id

uji yang diperoleh dari Dinas Perhubungan dan hasil survey khusus sektoral. Sedangkan harga konstan dihitung dengan cara deflasi.

Angkutan Laut

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan jumlah penumpang dan barang yang dimuat dari lapotan Dinas Perhubungan, dengan rata-rata output per penumpang dan barang. Sedangkan harga konstan menggunakan indeks gabungan tertimbang jumlah penumpang dan barang yang dimuat.

Angkutan Udara

Menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan jumlah penerimaan perusahaan angkutan udara yaitu penumpang dan barang muat. Harga konstan diperoleh dengan cara ekstrapolasi.

Pos dan Giro

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan pada data PT. Pos Indonesia, penjumlahan dari penerimaan atas kegiatan pos dan giro. Sedangkan output dan

http://natunakab.bps.go.id

nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung dengan metode ektrapolasi.

Jasa Penunjang Komunikasi

Penghitungan nilai tambah atas dasar harga berlaku sub sektor telekomunikasi dihitung berdasarkan data yang bersumber dari laporan keuangan Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi Tanjungpinang. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan indeks gabungan tertimbang yang meliputi jumlah menit percakapan lokal/interlokal.

Bank

Output subsector bank adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan biaya pengiriman wesel. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan metode deflasi.

Lembaga Keuangan Bukan Bank

http://natunakab.bps.go.id

Penghitungan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi. Output diperoleh dari perkalian indicator produksi dengan indicator harga sedangkan nilai tambah bruto diperoleh dengan cara mengurangkan nilai biaya antara dari nilai output. Atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi.

Sewa Bangunan

NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan jumlah bangunan dengan rata-rata tarif sewa untuk bangunan rural dan urban, sedangkan untuk penghitungan atas dasar harga konstan 2000 diperkirakan dengan metode ektrapolasi menggunakan jumlah bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal sebagai ekstapolatornya. Sedangkan harga berlaku diperkirakan dengan cara menginflate nilai bangunan dan tempat tinggal.

Jasa Perusahaan

Perkiraan output dan nilai tambah bruto didasarkan pada data jumlah tenaga kerja yang bersumber dari survey khusus dengan

http://natunakab.bps.go.id

rata-rata output per tenaga kerja dan persentase nilai tambah bruto yang juga diperoleh dari survey khusus sektoral.

Jasa Pemerintahan Umum

Subsektor ini terdiri upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah. Upah dan gaji yang dihitung mencangkup upah dan gaji belanja rutin dan sebagian dari belanja pembangunan. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakn indeks jumlah pegawai negeri dan daerah Kabupaten Natuna , termasuk didalamnya pemerintahan desa.

Jasa Pendidikan

Data output permurid dan persentase nilai tambah diperoleh dari kegiatan survey khusus. Sedangkan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode revaluasi.

Jasa Kesehatan

NTB atas dasar harga berlaku didasarkan kepada persentase terhadap output. Data yang digunakan bersumber dari Dinas Kesehatan serta dari survey khusus pendapatan regional. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000

http://natunakab.bps.go.id

dengan revaluasi masing-masing kegiatan yang terkait dengan jasa kesehatan medis dan non medis.

Sosial Kemasyarakatan Lainnya

Dari survey khusus diperoleh data rata-rata input rumah ibadat yang dikalikan dengan jumlah tempat ibadat. Sedangkan untuk penghitungan atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara revaluasi.

Jasa Hiburan dan Kebudayaan

Output dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dapat dihitung berdasarkan laporan keuangan dari perusahaan yang melakukan kegiatan jasa hiburan dan rekreasi. Nilai tambah bruto didapatkan dari penghitungan perkalian antara output dengan rasio nilai tambah. Outputnya diperoleh dari survey khusus.

Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

Nilai output diperkirakan dengan cara mengalikan jumlah tenaga kerja yang didasarkan kepada hasil survey khusus dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan untuk

http://natunakab.bps.go.id

memperoleh nilai tanbah bruto dengan cara mengalikan persentase nilai tambah btuto. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara ekstrapolasi.

2.4 Cara Penyajian dan Angka Indeks

PDRB seperti yang telah diuraikan, secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar tertentu, kedua bentuk penyajian tersebut dapat dijelaskan berikut ini:

a. Pada penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran produk domestik regional bruto.

b. Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar (dalam publikasi ini harga konstan didasarkan kepada harga pada tahun 2000). Karena

http://natunakab.bps.go.id

menggunakan harga tetap, maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata di sebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga. PDRB juga disajikan dalam bentuk peranan sektoral dan angka-angka indeks, yaitu: indeks perkembangan; indeks berantai; dan indeks harga implisit yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- ***Peranan Sektoral*** diperoleh dengan cara membagi nilai masing-masing sektor dengan nilai total seluruh sektor PDRB dikalikan 100 pada tahun yang bersangkutan (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000). Dalam penyajiannya, peranan sektor diberi judul tabel: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto.

- ***Indeks Perkembangan*** diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat dari tahun ke tahun terhadap tahun dasar.

http://natunakab.bps.go.id

- ***Indeks Berantai*** diperoleh dengan membagi nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya. Apabila angka ini dikalikan dengan angka 100 dan hasilnya dikurangi 100, maka angka ini menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat produksi untuk masing-masing tahun. Metode penghitungan ini dapat pula digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan sektoral.

- ***Indeks Harga Implisit*** diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahun dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Selanjutnya bila dari indeks harga implisit ini dihitung indeks berantainya (dengan rumus indeks berantai), akan terlihat tingkat perkembangan harga setiap tahun terhadap tahun sebelumnya. Indeks ini secara berkala juga dapat menunjukkan besaran inflasi yang mencakup seluruh barang dan jasa yang diproduksi di wilayah penghitungan PDRB.

http://natunakab.bps.go.id

2.5 Keterbatasan dan Masalah

Dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto ini tidak lepas dari masalah dan kendala. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana memperkirakan secara tepat pendapatan suatu daerah agar perhitungannya dapat mencerminkan keadaan perekonomian yang sebenarnya, sehingga dapat dipergunakan oleh para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan di daerah. Kendala utama yang ditemui dalam memperoleh data adalah masih banyaknya data yang tidak dapat diberikan secara lengkap oleh responden/sumber data. Namun demikian terus dilakukan berbagai upaya dalam rangka perbaikan terhadap data yang dihimpun. Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui koordinasi dengan BPS Kabupaten/Kota sekitar manakala terdapat data yang meliputi lebih dari satu daerah administrasi. Di samping itu pada saat pengumpulan data di lapangan senantiasa diberikan pemahaman kepada responden tentang arti penting data yang mereka berikan bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan, sehingga diharapkan responden tidak ragu ataupun takut dalam memberikan informasi yang benar.

Upaya lainnya adalah dengan menggali data dari berbagai sumber untuk melengkapi data-data yang tidak

https://natunakab.bps.go.id

lengkap series datanya, baik dari survei-survei yang dilakukan BPS maupun oleh instansi lain. Semua usaha tersebut diharapkan dapat meminimalkan kelemahan data yang ada.

http://natunakab.bps.go.id

BAB III

URAIAN SEKTORAL

Dalam bab ini dijelaskan tentang ruang lingkup dan definisi dari masing-masing sektor dan sub sektor, serta sumber data yang digunakan.

3.1 Sektor Pertanian

3.1.1 Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan

Subsektor ini meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela rambat, ketela pohon, umbi-umbian, kacang tanah, kacang kedelai, kacang-kacang lainnya, sayur-sayuran, buah-buahan, padi-padian serta bahan makanan lainnya, serta produksi ikutannya.

3.1.2 Sub Sektor Tanaman Perkebunan

Meliputi semua jenis kegiatan tanaman perkebunan baik yang diusahakan rakyat maupun yang diusahakan perusahaan perkebunan. Adapun komoditi yang

http://natunakab.bps.go.id

dihasilkan seperti : cengkeh, jahe, jambu mete, jarak, kako, karet, kapas kapok, kayu manis, kelapa sawit, kemiri, kina, kopi, lada, pala, panili, serat karung, tebu, tembakau, serta tanaman perkebunan lainnya.

3.1.3 Sub Sektor Peternakan

Meliputi semua kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dengan tujuan untuk dikembang biakan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasil-hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Komoditi hasil peternakan antara lain: sapi, kerbau, kambing, babi, ayam, itik, telur ayam, telur itik susu sapi serta hewan peliharaan lainnya.

3.1.4 Sub Sektor Kehutanan

Meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran. Termasuk juga kegiatan perburuan. Komoditi hasil kehutanan diantaranya adalah kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, arang, bambu, terpentin, kopal, menjangan, babi hutan, serat hasil hutan lainnya.

http://natunakab.bps.go.id

3.1.5 Sub Sektor Perikanan

Meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budi daya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada diair tawar maupun diair asin. Komoditi perikanan antara lain seperti ikan tuna dan jenis ikan laut lainnya, ikan mas dan jenis ikan darat lainnya, ikan bandeng dan jenis ikan air payau lainnya, udang dan binatang berkulit keras lainnya, cumi-cumi dan binatang lunak lainnya, rumput laut serta tumbuhan laut lainnya.

3.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

3.2.1 Subsektor Pertambangan Migas

Kegiatan pertambangan migas (minyak dan gas bumi) meliputi pencarian kandungan migas, penyiapan pengeboran, penambangan, penguapan, pemisahan, serta penampungan untuk dapat dijualatau dipasarkan. Hasil kegiatan ini adalah minyak bumi, kondensat, dan gas bumi. Data Pertambangan Migas di Kabupaten Natuna langsung dikirimkan ke pemerintah pusat.

http://natunakab.bps.go.id

3.2.2 Sub Sektor Pertambangan Tanpa Migas

Kegiatan subsektor ini meliputi pengambilan dan persiapan lanjutan benda padat, baik di bawah maupun diatas permukaan bumi serta seluruh kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memanfaatkan bijih logam dan hasil tambang lainnya. Contohnya komoditi bauksit, timah, granit dan sebagainya.

3.2.3 Sub Sektor Penggalian

Kegiatan subsektor ini meliputi penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir, dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi dan biasa disebut bahan galian golongan C. Hasil kegiatan ini antara lain batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, koalin, tanah liat dan sebagainya.

3.3 Sektor Industri Pengolahan

http://natunakab.bps.go.id

Kegiatan utama sektor industri adalah mengubah bentuk secara mekanis dan kimiawi dari bahan organik maupun non organik menjadi produk baru yang lebih tinggi nilainya. Proses tersebut dapat dilakukan dengan mesin atau tangan, baik dibuat didalam sebuah pabrik atau rumahtangga. Kegiatan sektor industri pengolahan non-migas dibagi dalam sembilan kelompok yaitu:

- Industri makanan, minuman dan tembakau
- Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit
- Industri kayu, bambu, rotan, dan perabot rumahtangga
- Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan, dan penerbitan
- Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batubara, karet dan plastik
- Indsutri barang-barang galian bukan logam. Kecuali minyak bumi dan batubara
- Industri logam dasar
- Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya
- Industri pengolahan lainnya

http://natunakab.bps.go.id

Kegiatan subsektor industri pengolahan mencakup 2 (dua) yaitu industri pengolahan besar/sedang dan industri kecil dan kerajinan rumahtangga (IKKR).

a. Industri Besar/Sedang

Industri Besar adalah industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja lebih besar dari 99 orang (>99) dan industri sedang adalah industri yang mempunyai tenaga kerja antara 20–99 orang.

b. Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga

Sub sektor ini sama dengan cakupan dan definisi kegiatan Industri Besar/Sedang, perbedaannya terletak pada jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan industri tersebut. Perusahaan dikatakan sebagai Industri Kecil jika jumlah tenaga kerjanya antara 5 sampai 19 orang, sedangkan Industri Kerajinan Rumah Tangga jika jumlah tenaga kerjanya kurang dari 5 orang.

http://natunakab.bps.go.id

3.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

3.4.1 Sub Sektor Listrik

Kegiatan ini mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun perusahaan Non PLN. Listrik yang dibangkitkan di produksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan listrik yang dicuri.

3.4.2 Sub Sektor Air Bersih

Kegiatan sub sektor ini meliputi kegiatan proses penjernihan, pemurnian, dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air bersih, serta pendistribusian dan penyalurannya secara langsung melalui pipa dan alat lain ke rumahtangga, instansi pemerintah dan swasta oleh Perusahaan Air Minum (PAM) maupun bukan PAM.

http://natunakab.bps.go.id

3.5 Sektor Konstruksi

Pada umumnya kegiatan sektor ini terdiri atas bermacam kegiatan yang meliputi pembuatan, pembangunan, pemasangan, dan perbaikan berat maupun ringan semua

jenis konstruksi yang keseluruhan kegiatan tersebut dapat dirinci menurut standar KBLI. Sektor bangunan terbagi ke dalam 5 (lima) sub konstruksi, yaitu:

1). Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal;

2). Prasarana Pertanian;

3). Jalan-Jembatan, Pelabuhan;

4). Bangunan Instalasi Listrik-Gas-Air Minum dan Komunikasi serta;

5). Bangunan lainnya.

3.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

3.6.1 Sub Sektor Perdagangan

Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas, untuk tujuan penyaluran/pendistribusian tanpa merubah sifat barang tersebut. Dalam perhitungannya dikelompokkan ke dalam dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan perdagangan

http://natuna.ab.bps.go.id

besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar mencakup kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan dan lembaga yang tidak mencari untung. Sedangkan perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumahtangga.

3.6.2 Sub Sektor Hotel

Sub sektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi di sini adalah hotel berbintang maupun hotel tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap, seperti losmen, motel dan sebagainya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap dimana kegiatan-kegiatan tersebut berada dalam satu manajemen dengan penginapan yang datanya sulit untuk dipisahkan.

http://natunakab.bps.go.id

3.6.3 Sub Sektor Restoran

Kegiatan sub sektor restoran mencakup usaha menyediakan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam sub sektor ini seperti rumah makan, warung sate, warung kopi, katering dan kantin.

3.7 Sektor Pengangkutan Dan Komunikasi

3.7.1 Sub Sektor Pengangkutan

Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor pengangkutan terdiri atas Jasa Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Udara, dan Jasa Penunjang Angkutan. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan untuk jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan dan pergudangan.

http://natunakab.bps.go.id

a. Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk disini kegiatan lainnya seperti charter/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi. Tidak termasuk kegiatan lainnya yang diusahakan sebagai satu kesatuan usaha dengan kegiatan ini, seperti jasa bongkar muat, keagenan barang dan penumpang, perbaikan dan pemeliharaan.

b. Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi didalam dan diluar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu satuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang dari kegiatan induknya dan data yang tersedia juga sulit untuk dipisahkan. Misalnya tanker yang diusahakan oleh Pertamina untuk angkutan di dalam negeri, kapal milik

http://natunakab.bps.go.id

perusahaan penangkapan ikan & angkutan khusus lainnya.

c. Angkutan Udara

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di daerah tersebut. Termasuk disini kegiatan lainnya yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang datanya sulit untuk dipisahkan, seperti EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara) dan lain-lain, baik untuk angkutan penerbangan dalam negeri maupun untuk penerbangan luar negeri. Tidak termasuk kegiatan penerbangan yang dilakukan oleh instansi/perkumpulan yang sifatnya tidak terbuka untuk umum.

d. Jasa Penunjang Angkutan

Mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal dan parkir), bongkar muat laut dan darat, keagenan penumpang, ekspedisi laut, jalan tol dan jasa penunjang

http://natunakab.bps.go.id

lainnya (pengerukan dan pengujian kelayakan angkutan laut). Sub sektor jasa penunjang angkutan (terminal, parkir, keagenan barang dan penumpang, ekspedisi, bongkar-muat, penggudangan) nilai tambah diperoleh dari SKPR. Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dengan menggunakan metode deflasi.

3.7.2 Sub Sektor Komunikasi

Sub sektor ini terdiri dari kegiatan pos dan giro, Telekomunikasi dan jasa Penunjang Komunikasi. Pos dan Giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan paket pos yang diusahakan oleh PT. Pos Indonesia. Telekomunikasi meliputi kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon dan telex yang diusahakan oleh PT. Telekomunikasi dan PT. Indosat. Jasa penunjang komunikasi meliputi kegiatan lainnya yang menunjang kegiatan komunikasi, seperti warung komunikasi (wartel), radio panggil (pager) dan telepon seluler (ponsel).

http://natunakab.bps.go.id

3.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor ini disebut sebagai sektor finansial, karena secara umum kegiatan utamanya berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan yang berupa penarikan dana dari masyarakat maupun penyalurannya ke masyarakat kembali. Secara garis besar sektor ini terbagi atas 3 (tiga) kelompok. Kelompok utama yaitu, usaha perbankan dan moneter (otoritas moneter), lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan serta usaha persewaan bangunan dan tanah. Namun dalam klasifikasi tahun 2000 sektor bank dan lembaga keuangan lainnya berubah menjadi Sektor Keuangan, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan. Sektor ini meliputi kegiatan subsektor perbankan, asuransi, koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan lainnya, serta persewaan bangunan bukan tempat tinggal dan kegiatan jasa perusahaan.

3.8.1 Subsektor Perbankan

Kegiatan yang dicangkup dalam subsektor ini adalah kegiatan yang memberikan jasa keuangan pada pihak

http://natunakab.bps.go.id

lain seperti: menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/ pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang, mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga dll. Dilihat dari segi fungsinya perusahaan bank dapat merupakan Bank Sentral, Bank Umum, Bank Devisa, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, dan Bank Desa. Sedangkan ditinjau dari segi kepemilikannya dapat merupakan Bank Pemerintah, Bank Swasta Nasional dan Bank Asing.

3.8.2 Subsektor Jasa Keuangan Bukan Bank

Sub sektor lembaga keuangan bukan bank mencakup kegiatan asuransi (asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi kerugian dan asuransi lainnya), mencakup juga koperasi (KUD dan non KUD), pegadaian dan dana pensiun.

3.8.3 Subsektor Lembaga Keuangan Lainnya

Sub sektor ini meliputi kopersi simpan pinjam, lembaga kredit perorangan, *money changer*, pasar modal, *leasing* dan lembaga keuangan bukan bank.

http://natunakab.bps.go.id

3.8.4 Subsektor Sewa Bangunan

Sub sektor ini mencakup semua kegiatan jasa yang berhubungan dengan proses penggunaan rumah atau bangunan sebagai tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, tanpa memperhatikan apakah rumah itu milik sendiri atau yang disewakan.

3.8.5 Subsektor Jasa Perusahaan

Sub sektor ini meliputi kegiatan advokasi, notaris, pengolahan data, periklanan, sewa-menyewa mesin dan alat-alat usaha.

3.9 Sektor Jasa-Jasa

Sektor ini mencakup sub sektor jasa pemerintahan umum dan sub sektor jasa swasta. Sub sektor pemerintahan umum meliputi pemerintahan dan Hankam. Sedangkan untuk sub sektor jasa swasta meliputi sub sektor jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan, jasa perorangan dan rumah tangga.

http://natunakab.bps.go.id

a. Subsektor Pemerintahan Umum

Subsektor ini meliputi administrasi pemerintahan dan pertahanan, serta kegiatan jasa pemerintahan lainnya.

b. Subsektor Swasta

Kegiatan pada subsektor swasta mencakup 3 kegiatan utama, yaitu:

1. Jasa Kemasyarakatan

Sub sektor jasa sosial dan kemasyarakatan mencakup jasa pendidikan (sekolah swasta) meliputi TK, SD, SLTP, SLTA dan Universitas/Akademi, jasa pendidikan (kursus), jasa kesehatan (swasta) seperti; rumah sakit, rumah sakit bersalin, dokter dan sebagainya. Kemudian jasa kemasyarakatan, jasa kesehatan dan jasa kemasyarakatan lainnya (panti asuhan dan panti jompo).

2. Jasa Hiburan

Sub sektor jasa hiburan mencakup kegiatan bioskop, panggung kesenian, radio swasta, taman hiburan, dan sebagainya.

http://natunakab.bps.go.id

3. Jasa Perorangan dan Rumahtangga

Subsektor ini mencakup kegiatan perbengkelan (mobil, motor, sepeda, alat-alat elektronik) dan jasa perorangan (tukang binatu, salon, tukang semir, tukang jahit dan sebagainya).

http://natunakab.bps.go.id

BAB IV

TINJAUAN PENDAPATAN REGIONAL

Kabupaten Natuna merupakan salah satu daerah otonomi dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau tahun 1999. Wilayahnya memiliki karakteristik yang khas, karena terdiri dari ratusan pulau yang tersebar diperairan Laut Cina Selatan. Pulau-pulau tersebut dapat dikelompokkan dalam 2 gugusan yaitu gugusan Pulau Natuna dan gugusan Pulau Serasan.

Letak wilayah geografis Kabupaten Natuna berada dititik koordinat $1^0$16'-$7^0$19' LU (Lintang Utara) dan $105^0$00'-$110^0$00' BT (Bujur Timur). Letaknya sangat strategis, berbatasan langsung dengan negara tetangga Kamboja, Vietnam dan Malaysia Timur. Daerah ini memiliki sumber daya alam yang potensial seperti Minyak, Gas Bumi, Bauksit, hasil pertanian dan perikanan. Dengan luas wilayah sebesar 264.198,37 Km^2 yang terdiri dari luas daratan 2.001,30 Km^2 dan luas lautan 262.197,07 Km^2 (Sumber: Natuna Dalam Angka 2010).

http://natunakab.bps.go.id

Dilihat dari luas wilayah Kabupaten Natuna 99,2 persen diantaranya terdiri atas perairan karena di Kabupaten Natuna terdiri dari banyak pulau. Pulau-pulau tersebut tersebar diperairan yang luas dan hubungan antar pulau umumnya dilakukan lewat laut. Berdasarkan situasi tersebut terlihat bahwa potensi yang paling dominan di Kabupaten Natuna adalah disektor pertanian khususnya pada subsektor perikanan.

Dengan demikian untuk mengukur perkembangan kuantitatif dan kemajuan perkembangan ekonomi Kabupaten Natuna serta sejauh mana kinerja pembangunan yang telah dicapai beberapa tahun terakhir akan disajikan pada bab ini, seperti laju pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, PDRB per kapita dan pendapatan per Kapita.

http://natunakab.bps.go.id

4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh aktivitas sektor-sektor ekonomi secara menyeluruh dan terpadu. Aktivitas sektor-sektor ekonomi yang digambarkan dengan proses siklus transaksi dari produsen kepada konsumen dan sebaliknya, akan berujung pada arus barang dan jasa seiring dengan adanya nilai tambah yang

tercipta. PDRB sektoral menggambarkan jumlah seluruh nilai tambah bruto dari subsektor/sektor di suatu wilayah.

Berdasarkan teori pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan pendapatan nasional yang tercemin pada nilai PDRB dari tahun ke tahun. Indikator yang lazim digunakan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi riil adalah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan yang menjadi petunjuk dari kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah.

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di daerah dalam lingkup Kabupaten/Kota adalah jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satu tahun, atau disebut Produk Domestik regional Bruto (PDRB). Dengan berjalannya otonomi daerah terjadi perubahan jumlah produksi dan harga barang/jasa yang merupakan faktor utama pendorong dalam kenaikkan/turunya nilai PDRB. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna dalam periode 2006-2010 mencapai rata-rata 6 persen per tahun. Suatu kondisi ekonomi daerah yang cukup bagus dan perlu adanya

http://natunakab.bps.go.id

kebijakan-kebijakan lebih baik lagi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan datang.

Grafik 4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Tahun 2006-2010 (persen)

http://natunakab.bps.go.id

Secara umum laju pertumbuhan ekonomi baik agregat maupun sektoral dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku belum menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan yang riil, karena masih dipengaruhi kenaikan tingkat harga atau

inflasi. Tabel 4.1 menggambarkan nilai tambah Kabupaten Natuna menurut 3 sektor yaitu primer, sekunder dan tersier dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 4.1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2010

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009)*	2010)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Primer	940.206	991.51	572.984	610.818	658.759
2. Sekunder	65.045	73.147	60.869	72.812	86.397
3. Tersier	354.987	428.952	260.881	294.19	332.236
Total	**1.360.237**	**1.493.608**	**894.734**	**977.821**	**1.077.292**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa kelompok sektor primer masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Natuna. Total nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dari kelompok primer tahun 2010 mencapai Rp. 658 milyar atau meningkat 7,85 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 610 milyar. Sedangkan sektor sekunder sebesar Rp.

86,39 juta atau meningkat sebesar 18,66 persen dari tahun sebelumnya dan sektor tersier meningkat sebesar 12,93 persen atau Rp. 332 milyar.

Apabila dihitung atas dasar harga konstan 2000, kinerja sektor primer tahun 2010 mampu tumbuh sebesar 4,73 persen dari tahun 2009. Nilai tambah sektor primer meningkat menjadi Rp. 275 milyar di tahun 2010 dari nilai Rp. 263 milyar pada tahun 2009. Sementara itu kelompok sektor sekunder masih sangat kecil yaitu sebesar Rp. 33,10 juta tahun 2009 meningkat sebesar Rp. 37,12 juta pada tahun 2010 atau tumbuh sebesar 12,15 persen. Sedangkan sektor tersier tumbuh sebesar 8,14 persen pada 2010 meningkat sebesar Rp. 109 milyar menjadi Rp.117 milyar.

http://natunakab.bps.go.id

Tabel 4.2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006-2010

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009)*	2010)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Primer	418.436	439.963	251.043	263.427	275.898
2. Sekunder	32.752	36.089	29.15	33.101	37.123
3. Tersier	164.303	176.612	101.12	109.119	117.997
Total	**615.491**	**652.664**	**381.313**	**405.647**	**431.019**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

http://natunakab.bps.go.id

Laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan merupakan rata-rata tertimbang dari pertumbuhan sektoralnya. Artinya apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi besar dan ternyata pertumbuhannya lambat maka hal ini dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya apabila sektor yang mempunyai kontribusi besar mempunyai pertumbuhan yang tinggi maka sektor tersebut dapat mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi. Laju pertumbuhan Kabupaten Natuna tahun 2009 berada

pada level 6,38 persen sedangkan tahun 2010 mengalami sedikit perlambatan yaitu berada pada level 6,25 persen.

Tabel 4.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006 – 2010 (persen)

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009)*	2010)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	6,07	5,11	5,12	4,90	4,70
2. Pertambangan & Penggalian	2,61	12,05	9,72	9,79	9,23
3. Industri	4,34	4,98	5,25	4,50	5,39
4. Listrik, Gas dan Air	1,69	3,52	3,68	3,55	3,53
5. Bangunan	5,52	16,69	20,79	22,02	18,14
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	3,70	7,18	7,4	9,11	9,40
7. Pengangkutan & Komunikasi	6,46	9,08	9,19	9,77	9,74
8. Keuangan & Jasa Perusahaan	4,94	4,95	4,99	5,19	5,63
9. Jasa-jasa	6,03	8,54	5,23	5,43	5,47
PDRB	**5,62**	**6,04**	**6,05**	**6,38**	**6,25**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

http://natunakab.bps.go.id

Secara riil, laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dari besaran PDRB atas dasar harga konstan, mengalami perlambatan sebesar 6,25 persen pada tahun 2010, yaitu dari Rp. 405 milyar tahun

2009 menjadi Rp. 431 milyar pada tahun 2010. Hal ini disebabkan adanya penurunan sebagian sektor dalam perekonomian. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan hanyalah sektor Industri, perdagangan, Hotel dan Restoran, Keuangan dan Jasa.

Sektor Bangunan yang berupa bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 18,14 persen pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2009 pertumbuhannya juga cukup tinggi yaitu 22,02 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, permintaan akan kebutuhan tempat tinggal oleh masyarakat serta pembangunan sarana dan prasarana kantor-kantor instansi baik itu dari pemerintah daerah maupun pusat tidak sebesar tahun 2009.

Kontribusi sektor terbesar ke dua yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi. Laju pertumbuhan sektor ini mencapai level 9,74 persen. Dibandingkan tahun 2009 pertumbuhannya turun, ini dikarenakan kegiatan pengangkutan barang/penumpang dengan menggunakan alat angkutan darat tidak sebesar tahun sebelumnya begitu juga dengan angkutan

http://natunakab.bps.go.id

udara. Kontribusi sektor terbesar ketiga adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dimana laju pertumbuhan sebesar 9,40 persen.

Grafik 4.2
Laju Pertumbuhan Menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Kabupaten Natuna Tahun 2006 – 2010 (Persen)

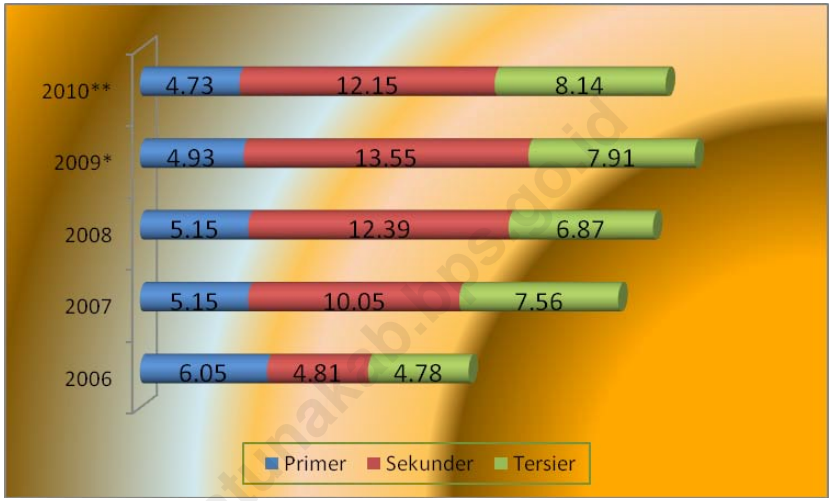

http://natunakab.bps.go.id

4.2 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal tersebut juga menunjukkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap sektor ekonominya. Makin besar nilai tambah yang dapat diraih oleh suatu sektor maka semakin besarlah peranannya dalam perekonomian daerah tersebut.

Tabel 4.4
Distribusi PDRB Kabupaten Natuna Tahun 2006 – 2010 (persen)

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009*	2010**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1. Pertanian	68,79	66,03	63,62	62,04	60,70
2. Pertambangan & Penggalian	0,34	0,35	0,42	0,43	0,44
3. Industri	1,81	1,73	2,27	2,19	2,17
4. Listrik, Gas dan Air	0,08	0,08	0,1	0,10	0,10
5. Bangunan	2,89	3,08	4,44	5,16	5,76
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	13,90	15,21	15,2	16,13	16,90
7. Pengangkutan & Komunikasi	3,59	3,95	4,1	4,22	4,31
8. Keuangan & Jasa Perusahaan	2,85	3,05	2,88	2,86	2,90
9. Jasa-jasa	5,76	6,51	6,98	6,85	6,73
P D R B	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Kontribusi terbesar dalam penciptaan nilai tambah pada perekonomian Kabupaten Natuna selama kurun waktu lima tahun terakhir selalu disumbangkan oleh sektor pertanian. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kontribusinya rata-rata 60 persen tiap tahunnya tetapi cenderung mengalami penurunan.

Peranan terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dari tahun 2006-2010, peranan sektor ini cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 13,90 persen pada tahun 2006 meningkat menjadi 16,90 persen pada tahun 2010. Hal ini terjadi karena meningkatnya usaha perdagangan enceran dan bertambahnya usaha hotel dan restoran.

Sektor penyumbang terbesar ketiga adalah sektor jasa-jasa. Sektor ini memberikan kontribusi terhadap penciptaan nilai tambah pada perekonomian Kabupaten Natuna sebesar 6,73 persen. Selama lima tahun terakhir kontribusi sektor ini meningkat dari 5,76 persen di tahun 2006 meningkat menjadi 6,73 persen di tahun 2010.

Untuk lebih jelasnya, besaran peranan masing-masing sektor terhadap penciptaan nilai tambah perekonomian Kabupaten Natuna dapat dilihat pada grafik 4.3.

http://natunakab.bps.go.id

Grafik 4.3
Distribusi PDRB Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha, 2010
(Persen)

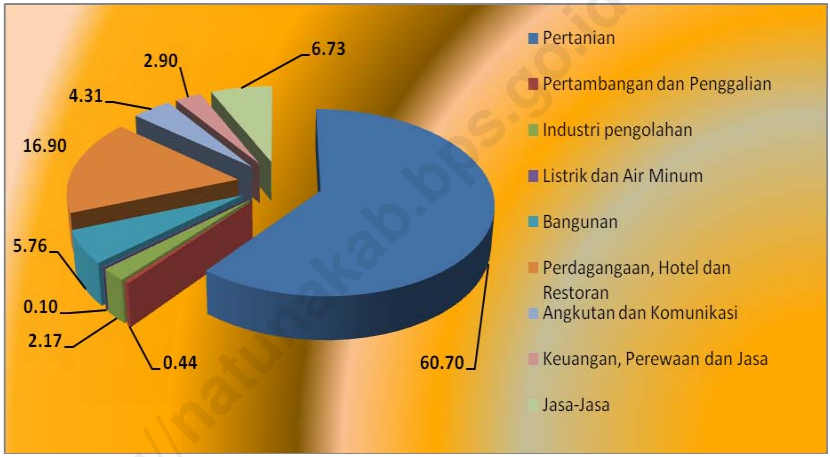

http://natunakab.bps.go.id

4.3 PDRB dan Pendapatan per Kapita

Nilai PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah bruto yang diciptakan oleh setiap penduduk disuatu

daerah sebagai akibat adanya proses produksi dalam rangkaian kegiatan ekonomi. Sementara itu pendapatan regional perkapita memberikan gambaran mengenai pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai balas jasa keikutsertaannya dalam proses produksi. Besaran ini diperoleh dengan cara membagi PDRB/Pendapatan Regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (karena penyebarannya dianggap lebih merata). Kedua indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat peningkatan dalam pendistribusian PDRB per kapita maupun pendapatan per kapita.

Salah satu tujuan tingkat kemakmuran dalam pencapaian pembangunan nasional dan regional adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang disertai dengan pengurangan tingkat penggurangan dan tingkat kemiskinan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan juga perbaikan derajat kesehatan, sehingga dapat tercapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. PDRB per kapita dan pendapatan per

http://natunakab.bps.go.id

kapita menjadi salah satu tolak ukur dalam pencapaian tingkat kemakmuran rakyat tersebut.

Tabel 4.5

PDRB dan Pendapatan Per Kapita
Kabupaten Natuna Tahun 2006-2010

Rincian	Nominal	Rill
I. PDRB Per Kapita		
2006	14,476	6,550
2007	14,738	6,440
2008	14,716	6,272
2009*	15,776	6,545
2010**	15,613	6,246
II. Pendapatan Per Kapita		
2006	13,655	6,179
2007	13,903	6,075
2008	13,882	5,916

http://natunakab.bps.go.id

Pendapatan Regional Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha, 2010

2009*	14,882	6,138
2010**	14,728	5,858

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Dari tabel 4.5 diketahui bahwa PDRB perkapita secara nominal (atas dasar harga berlaku) lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sebesar 7,85 persen. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang cukup berarti yang diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. Namun secara riil (atas dasar harga konstan) lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan yaitu sebesar 4,64 persen. Walaupun PDRB perkapita harga berlaku cukup tinggi namun tidak berarti bahwa kemampuan daya beli masyarakat juga meningkat. Sebab angka tersebut masih dipengaruhi oleh unsur kenaikkan harga barang dan jasa. Artinya nilai tersebut masih terkandung unsur inflasi.

Grafik 4.4 PDRB Perkapita menurut Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Natuna, 2006-2010

http://natunakab.bps.go.id

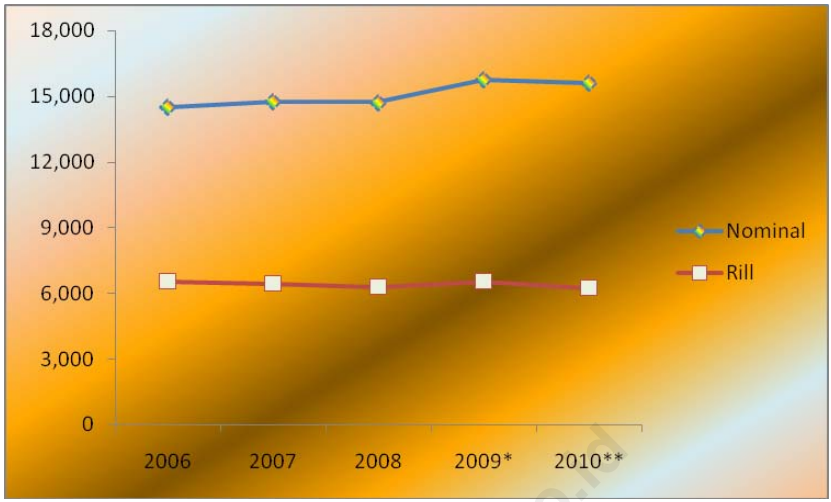

Apabila pengaruh perubahan harga dikeluarkan, maka penghitungan tersebut merupakan angka atas dasar harga konstan. Jumlah penduduk Kabupaten Natuna pada pertengahan tahun 2010 adalah 69.003 jiwa, sehingga pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku adalah 14,728 juta rupiah. Angka tersebut menggambarkan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di Kabupaten Natuna pertahunnya.

http://natunakab.bps.go.id

BAB V

PERBANDINGAN INDIKATOR EKONOMI ANTAR REGION

Bab ini memaparkan perkembangan PDRB masing-masing kabupaten/kota se- Provinsi Riau selama periode 2008-2010. Dengan menyajikan bab ini ingin mengetahui sudah sejauh mana peranan perekonomian dari setiap kabupaten/kota dan dapat melihat keberadaan posisi perekonomian Kabupaten Natuna dalam menggerakkan roda perekonomian Provinsi Kepulauan Riau.

5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dengan menyimak secara seksama, ternyata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh kabupaten/kota mengalami pola yang sama seperti perekonomi Indonesia. Selama tahun 2010 laju pertumbuhan seluruh kabupaten/kota dan Riau tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2009.

http://natunakab.bps.go.id

Selama tiga tahun terakhir, perkembangan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau berjalan baik karena seluruhnya mengalami pertumbuhan posistif. Kota Batam senantiasa paling tertinggi, tercatat selama tahun 2010 sebesar 7,77 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi ke dua berasal dari Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 7,16 persen. Hal ini terjadi memang di kabupaten tersebut lagi gencar gencarnya membangun perekonomian karena baru terbentuk kabupaten baru. Tertinggi ke tiga berasal dari Kota Tanjungpinang mencapai 7,08 persen, tertiggi ke empat adalah Kabupaten Lingga menggapai 6,60 persen dan ke lima berasal dari Kabupaten Karimun dengan laju pertumbuhan sebesar 6,56 persen. Sedangkan Kabupaten Natuna diposisi ke enam dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan pertumbuhan 6,25 persen.

http://natunakab.bps.go.id

Tabel 5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau (Persen)

2008-2010

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010*
01. Karimun	6,04	6,30	6,56
02. Bintan	5,27	5,11	5,56
03. Natuna	6,05	6,38	6,25
04. Lingga	6,65	6,63	6,60
05. Anambas	-	6,93	7,16
71. Batam	7,18	4,86	7,77
72. Tanjungpinang	7,07	6,97	7,08
KEPULAUAN RIAU	**7,22**	**3,66**	**7,53**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
Keterangan : *) Angka Sementara

Bila dilihat table 5.1 Kota Batam tahun 2010 pertumbuhannya meningkat secara signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelum. Hal ini berdampak kepada pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau yang meningkat dari 3,66 persen di tahun 2009 menjadi 7,53 persen di tahun 2010. Secara umum pertumbuhan ekonomi tahun 2010 di kabupaten/kota Provinsi

Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan yang peningkatan tetapi hanya saja Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna yang sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2009.

5.2 Kontribusi PDRB

Besarnya kontribusi yang disumbangakan setiap sector ekonomi terhadap pembentukan nilai tambahperekonomian yang terermin dalam total PDRB dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Dari table 6.2 terlihat adanya perbedaan sektoral yang sangat dominan antara komposisi pembentuk PDRB Provinsi Kepulauan Riau dengan Kabupaten Natuna.

Sektor yang paling mendominasi di Provinsi Kepulauan Riau adalah sector industri pengolahan dimana kontribusinya mencapai 50,36 persen. Selanjutnya diikuti oleh sector perdagangan, hotel & restoran dengan besaran 21,32 persen. Kontribusi yang ketiga adalah di sector bangunan yang mencapai 7,93 persen. Secara umum dapat dikatakan

http://natunakab.bps.go.id

pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau bergerak dibidang industry.

Tabel 5.2. Perbandingan Distribusi PDRB Tanpa Migas Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2010 (%)

Lapangan Usaha	Kep. Riau		Natuna	
	2009	2010*	2009	2010*
1. Pertanian	5,41	5,16	62,04	60,70
2. Pertambangan & Penggalian	1,30	1,24	0,43	0,44
3. Industri Pengolahan	49,98	50,36	2,19	2,17
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,60	0,61	0,10	0,10
5. Bangunan	7,69	7,93	5,16	5,76
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	21,14	21,32	16,13	16,90
7. Angkutan & Komunikasi	5,04	4,88	4,22	4,31
8. Keuangan	5,85	5,59	2,86	2,90
9. Jasa-jasa	3,00	2,91	6,85	6,73
Total PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
Keterangan : *) Angka Sementara

http://natunakab.bps.go.id

Sementara untuk Kabupaten Natuna, sector yang menjadi dominasi pembentukan PDRB yaitu sector pertanian meskipun ada kecenderungan menurun yaitu mencapai 60,70 persen. Selanjutnya diikuti oleh sector perdagangan, hotel & restoran sebesar 16,90 persen. Sedangkan sector ketiga adalah sector jasa-jasa dengan kontribusi 6,73 persen. Secara umum dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Natuna bergerak dibidang sector pertanian khususnya di sub sector perikanan.

5.3 PDRB dan Pendapatan Per Kapita

Selama kurun waktu 2008-2010 PDRB kabupaten/kota mengalami peningkatan yang cukup berarti. Demikian pula secara riil (atas dasar harga konstan 2000) mengalami peningkatan pada tahun 2010. Begitu juga dengan PDRB dan Pendapatan Per Kapita.

Pada umumnya nilai PDRB dan Pendapatan Per Kapita yang dicapai oleh suatu wilayah secara tidak langsung menunjukkan tingkat kesejahteraan diwilayah tersebut.

Selama tahun 2008-2010 PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Menurut atas dasar harga berlaku tahun 2008 sebesar 35,14 juta rupiah berikutnya menjadi 36,75 juta rupiah di tahun 2009. Sedangkan tahun 2010 meningkat sebesar 39,61 juta rupiah.

Pendapatan Regional Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha, 2010

http://natunakab.bps.go.id

Dilihat dari PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota tahun 2010, Kota Batam yang paling besar yaitu 50,09 juta rupiah. Nilai ini diatas PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lingga yaitu sebesar 11,85 juta rupiah. Kabupaten Natuna berada diatas Kabupaten Lingga yaitu sebesar 15,61 juta rupiah.

Tabel 6.3 PDRB Per Kapita Tanpa Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2008-2010 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010*
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Atas Dasar Harga Berlaku			
Karimun	16,80	18,27	20,17
Bintan	27,84	29,05	31,09
Natuna	14,72	15,78	15,61
Lingga	9,82	10,73	11,85
Anambas	15,43	16,39	17,66
Batam	51,71	46,27	50,09
Tanjungpinang	23,19	24,88	27,63
KEPULAUAN RIAU	**35,14**	**36,75**	**39,61**
B. Atas Dasar Harga Konstan			
Karimun	8,78	9,16	9,60
Bintan	19,14	19,66	20,33
Natuna	6,27	6,54	6,25
Lingga	6,19	6,57	6,97
Anambas	6,57	6,89	7,24
Batam	33,61	32,11	29,77
Tanjungpinang	12,35	12,89	13,51
KEPULAUAN RIAU	**23,04**	**22,77**	**23,44**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Keterangan : *) Angka Sementara

Namun secara riil (konstan), paling besar PDRB Per Kapita adalah Kota Batam sebesar 29,77 juta rupiah. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Natuna sebesar 6,25 juta rupiah. Dan Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga konstan sebesar 23,44 juta rupiah masih di bawah Kota Batam nilainya.

Tabel 6.4 Pendapatan Per Kapita Tanpa Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2008-2010 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010*
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Atas Dasar Harga Berlaku			
Karimun	15,61	16,97	18,74
Bintan	22,86	23,85	25,53
Natuna	13,88	14,88	14,73
Lingga	8,97	9,81	10,83
Anambas	12,80	13,60	14,65
Batam	36,82	36,91	37,18
Tanjungpinang	21,97	23,58	26,18
KEPULAUAN RIAU	**29,15**	**30,48**	**32,86**
B. Atas Dasar Harga Konstan			
Karimun	8,16	8,51	8,92
Bintan	16,90	17,35	17,95
Natuna	5,92	6,14	5,86
Lingga	5,66	6,01	6,37
Anambas	5,45	5,71	6,01
Batam	24,58	23,81	23,16

http://natunakab.bps.go.id

Tanjungpinang	12,11	12,65	13,25
KEPULAUAN RIAU	**19,12**	**18,89**	**19,44**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
Keterangan : *) Angka Sementara

Sebagaimana halnya PDRB Per Kapita, pendapatan per kapita yang paling besar diantara kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau adalah Kota Batam. Secara nominal besarnya 37,18 juta rupiah sementara riilnya sebesar 23,16 juta rupiah. Dan Provinsi Kepulauan Riau secara nominal sebesar 32,86 juta rupiah dan riilnya 19,44 juta rupiah. Nilai tersebut masih jauh dibawah Kota Batam. Begitu juga dengan Kabupaten Natuna yang secara nominal hanya 14,73 juta rupiah dan riilnya hanya sebesar 5,86 juta rupiah.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau masih belum mencapai taraf pemerataan. Hal ini tercermin dari nilai besaran PDRB dan pendapatan per kapita kabupaten/kota masih ketimpang.

http://natunakab.bps.go.id

LAMPIRAN
TABEL-TABEL

LAMPIRAN TABEL-TABEL http://natuna.kab.bps.go.id

TABEL 1. PDRB KABUPATEN NATUNA ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2006-2010
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009*	2010**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. PERTANIAN	**935,647**	**986,248**	**569,202**	**606,595**	**654,015**
a, Tanaman Bahan Makanan	38,631	39,969	33,131	34,476	36,898
b, Tanaman Perkebunan	50,440	53,075	47,407	47,485	48,751
c, Peternakan & Hasil- hasilnya	31,265	31,398	25,807	26,124	27,438
d, Kehutanan	19,764	20,232	15,650	16,261	17,075
e, Perikanan	795,547	841,573	447,206	482,249	523,853
2.PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	**4,559**	**5,262**	**3,782**	**4,224**	**4,744**
a, Pertambangan	-	-	-	-	-
b, Penggalian	4,559	5,262	3,782	4,224	4,744
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	**24,680**	**25,911**	**20,291**	**21,407**	**23,335**
a, Industri B/S	18,915	19,580	15,392	16,012	17,208
b, I K K R	5,764	6,331	4,899	5,395	6,127
4. LISTRIK & AIR MINUM	**1,102**	**1,189**	**857**	**942**	**1,036**
a. Listrik	603	624	439	481	529
b. Air Minum	498	565	418	461	507
5. BANGUNAN	**39,264**	**46,047**	**39,720**	**50,464**	**62,026**
6. PERDAGANGAN, HTL & REST.	**189,020**	**227,210**	**135,998**	**157,749**	**182,115**
a, Perdagangan Besar & Eceran	179,982	216,879	129,837	150,809	174,304
b, Hotel	965	1,052	811	936	1,072
c, Restoran & Rumah Makan	8,073	9,279	5,351	6,004	6,738
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	**48,854**	**58,925**	**36,666**	**41,273**	**46,392**
a. Pengangkutan	47,786	57,772	35,857	40,388	45,417
1. Angkutan Darat	13,351	16,441	16,004	18,033	20,283
2. Angkatan Laut	31,549	37,787	17,230	19,475	21,936
3. Angkutan Udara	522	694	555	743	985
4. Jasa Penunjang Angkutan	2,365	2,850	2,068	2,136	2,212
b. Komunikasi	1,068	1,153	809	885	976
8, KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA	**38,729**	**45,542**	**25,757**	**28,213**	**31,232**
a.Bank	79	87	48	58	70
b.Lembaga Keuangan Bukan Bank	1,244	1,403	950	1,055	1,133
c. Sewa Bangunan	37,343	43,988	24,726	27,065	29,992
d. Jasa Perusahaan	64	64	32	35	36
9, JASA - JASA	**78,384**	**97,274**	**62,460**	**66,956**	**72,497**
a, Pemerintahan Umum	58,469	65,837	48,464	51,885	56,256
b. Swasta	19,914	23,639	13,996	15,070	16,241
1. Sosial Kemasyarakatan	8,037	10,517	6,711	7,267	7,880
2. Hiburan dan Rekreasi	3,998	4,758	2,834	3,033	3,252
3. Perorangan & Rumah tangga	7,879	8,363	4,451	4,770	5,109
PDRB	**1,360,238**	**1,493,609**	**894,734**	**977,821**	**1,077,392**

Catatan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sangat Sementara

http://natunakab.bps.go.id

TABEL 2. PDRB KABUPATEN NATUNA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2006-2010
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009*	2010**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. PERTANIAN	**416,276**	**437,542**	**249,317**	**261,532**	**273,828**
a, Tanaman Bahan Makanan	20,165	20,633	17,130	17,781	18,474
b, Tanaman Perkebunan	19,130	19,891	16,911	16,916	16,957
c, Peternakan & Hasil- hasilnya	11,320	11,366	9,266	9,332	9,505
d, Kehutanan	9,149	9,362	7,217	7,419	7,631
e, Perikanan	356,511	376,290	198,792	210,084	221,260
2.PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	**2,160**	**2,421**	**1,726**	**1,895**	**2,070**
a, Pertambangan	-	-	-	-	-
b, Penggalian	2,160	2,421	1,726	1,895	2,070
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	**17,611**	**18,489**	**14,338**	**15,098**	**15,913**
a, Industri B/S	13,342	13,802	10,726	11,121	11,532
b, I K K R	4,269	4,687	3,612	3,978	4,381
4. LISTRIK & AIR MINUM	**518**	**537**	**384**	**398**	**412**
a. Listrik	260	268	188	194	201
b. Air Minum	259	269	196	203	210
5. BANGUNAN	**14,622**	**17,063**	**14,428**	**17,605**	**20,799**
6. PERDAGANGAN, HTL & REST.	**88,586**	**94,951**	**51,137**	**55,797**	**61,043**
a, Perdagangan Besar & Eceran	82,834	88,742	47,636	51,976	56,877
b, Hotel	621	675	514	565	621
c, Restoran & Rumah Makan	5,131	5,534	2,987	3,257	3,545
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	**23,627**	**25,771**	**14,919**	**16,376**	**17,970**
a. Pengangkutan	22,780	24,864	14,287	15,699	17,240
1. Angkutan Darat	6,499	7,177	6,357	7,045	7,758
2. Angkatan Laut	15,164	16,526	7,204	7,894	8,686
3. Angkutan Udara	210	236	160	181	204
4. Jasa Penunjang Angkutan	907	926	567	579	591
b. Komunikasi	847	907	632	677	730
8, KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA	**18,106**	**19,002**	**10,044**	**10,566**	**11,160**
a.Bank	45	49	28	31	36
b.Lembaga Keuangan Bukan Bank	651	670	414	431	449
c. Sewa Bangunan	17,382	18,255	9,588	10,089	10,661
d. Jasa Perusahaan	29	29	15	15	15
9, JASA - JASA	**33,984**	**36,888**	**25,020**	**26,380**	**27,824**
a, Pemerintahan Umum	24,051	26,551	19,641	20,780	21,992
b. Swasta	9,933	10,337	5,379	5,599	5,832
1. Sosial Kemasyarakatan	2,068	2,190	1,160	1,229	1,302
2. Hiburan dan Rekreasi	2,053	2,129	1,105	1,146	1,190
3. Perorangan & Rumah tangga	5,812	6,018	3,114	3,224	3,340

http://natunakab.bps.go.id

PDRB	615,491	652,664	381,313	405,647	431,019

TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN NATUNA ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2006-2010, (Persen)

Catatan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sangat Sementara

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009*	2010**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. PERTANIAN	**68.79**	**66.03**	**63.62**	**62.04**	**60.70**
a, Tanaman Bahan Makanan	2.84	2.68	3.70	3.53	3.42
b, Tanaman Perkebunan	3.71	3.55	5.30	4.86	4.52
c, Peternakan & Hasil- hasilnya	2.30	2.10	2.88	2.67	2.55
d, Kehutanan	1.45	1.35	1.75	1.66	1.58
e, Perikanan	58.49	56.34	49.98	49.32	48.62
2.PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	**0.34**	**0.35**	**0.42**	**0.43**	**0.44**
a, Pertambangan	-	-	-	-	-
b, Penggalian	0.34	0.35	0.42	0.43	0.44
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	**1.81**	**1.73**	**2.27**	**2.19**	**2.17**
a, Industri B/S	1.39	1.31	1.72	1.64	1.60
b, I K K R	0.42	0.42	0.55	0.55	0.57
4. LISTRIK & AIR MINUM	**0.08**	**0.08**	**0.10**	**0.10**	**0.10**
a. Listrik	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
b. Air Minum	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
5. BANGUNAN	**2.89**	**3.08**	**4.44**	**5.16**	**5.76**
6. PERDAGANGAN, HTL & REST.	**13.90**	**15.21**	**15.20**	**16.13**	**16.90**
a, Perdagangan Besar & Eceran	13.23	14.52	14.51	15.42	16.18
b, Hotel	0.07	0.07	0.09	0.10	0.10
c, Restoran & Rumah Makan	0.59	0.62	0.60	0.61	0.63
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	**3.59**	**3.95**	**4.10**	**4.22**	**4.31**
a. Pengangkutan	3.51	3.87	4.01	4.13	4.22
1. Angkutan Darat	0.98	1.10	1.79	1.84	1.88
2. Angkatan Laut	2.32	2.53	1.93	1.99	2.04
3. Angkutan Udara	0.04	0.05	0.06	0.08	0.09
4. Jasa Penunjang Angkutan	0.17	0.19	0.23	0.22	0.21
b. Komunikasi	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09
8, KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA	**2.85**	**3.05**	**2.88**	**2.89**	**2.90**
a.Bank	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
b.Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11
c. Sewa Bangunan	2.75	2.95	2.76	2.77	2.78
d. Jasa Perusahaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9, JASA - JASA	**5.76**	**6.51**	**6.98**	**6.85**	**6.73**
a, Pemerintahan Umum	4.30	4.41	5.42	5.31	5.22
b. Swasta	1.46	1.58	1.56	1.54	1.51
1. Sosial Kemasyarakatan	0.59	0.70	0.75	0.74	0.73

http://natunakab.bps.go.id

2. Hiburan dan Rekreasi	0.29	0.32	0.32	0.31	0.30
3. Perorangan & Rumah tangga	0.58	0.56	0.50	0.49	0.47
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Catatan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sangat Sementara

TABEL 4. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN NATUNA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2006-2010 (Persen)

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009*	2010**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. PERTANIAN	**67.63**	**67.04**	**65.38**	**64.47**	**63.53**
a, Tanaman Bahan Makanan	3.28	3.16	4.49	4.38	4.29
b, Tanaman Perkebunan	3.11	3.05	4.43	4.17	3.93
c, Peternakan & Hasil- hasilnya	1.84	1.74	2.43	2.30	2.21
d, Kehutanan	1.49	1.43	1.89	1.83	1.77
e, Perikanan	57.92	57.65	52.13	51.79	51.33
2.PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	**0.35**	**0.37**	**0.45**	**0.47**	**0.48**
a, Pertambangan	-	-	-	-	-
b, Penggalian	0.35	0.37	0.45	0.47	0.48
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	**2.86**	**2.83**	**3.76**	**3.72**	**3.69**
a, Industri B/S	2.17	2.11	2.81	2.74	2.68
b, I K K R	0.69	0.72	0.95	0.98	1.02
4. LISTRIK & AIR MINUM	**0.08**	**0.08**	**0.10**	**0.10**	**0.10**
a. Listrik	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
b. Air Minum	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
5. BANGUNAN	**2.38**	**2.61**	**3.78**	**4.34**	**4.83**
6. PERDAGANGAN, HTL & REST.	**14.39**	**14.55**	**13.41**	**13.76**	**14.16**
a, Perdagangan Besar & Eceran	13.46	13.60	12.49	12.81	13.20
b, Hotel	0.10	0.10	0.13	0.14	0.14
c, Restoran & Rumah Makan	0.83	0.85	0.78	0.80	0.82
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	**3.84**	**3.95**	**3.91**	**4.04**	**4.17**
a. Pengangkutan	3.70	3.81	3.75	3.87	4.00
1. Angkutan Darat	1.06	1.10	1.67	1.74	1.80
2. Angkatan Laut	2.46	2.53	1.89	1.95	2.02
3. Angkutan Udara	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05
4. Jasa Penunjang Angkutan	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14
b. Komunikasi	0.14	0.14	0.17	0.17	0.17
8, KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA	**2.94**	**2.91**	**2.63**	**2.60**	**2.59**
a.Bank	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
b.Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10
c. Sewa Bangunan	2.82	2.80	2.51	2.49	2.47
d. Jasa Perusahaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

http://natunakab.bps.go.id

9, JASA - JASA	**5.52**	**5.65**	**6.56**	**6.50**	**6.46**
a, Pemerintahan Umum	3.91	4.07	5.15	5.12	5.10
b. Swasta	1.61	1.58	1.41	1.38	1.35
1. Sosial Kemasyarakatan	0.34	0.34	0.30	0.30	0.30
2. Hiburan dan Rekreasi	0.33	0.33	0.29	0.28	0.28
3. Perorangan & Rumah tangga	0.94	0.92	0.82	0.79	0.77
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Catatan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sangat Sementara

TABEL 5. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN NATUNA ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2006-2010

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009*	2010**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. PERTANIAN	**333.28**	**351.30**	**370.73**	**395.09**	**425.97**
a, Tanaman Bahan Makanan	222.59	230.30	349.06	363.22	388.75
b, Tanaman Perkebunan	345.31	363.36	593.44	594.43	610.27
c, Peternakan & Hasil- hasilnya	297.17	298.44	448.52	454.03	476.85
d, Kehutanan	259.98	266.14	376.44	391.12	410.71
e, Perikanan	344.91	364.86	354.52	382.30	415.28
2.PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	**245.92**	**283.82**	**373.04**	**416.61**	**467.89**
a, Pertambangan	-	-	-	-	-
b, Penggalian	245.92	283.82	373.04	416.61	467.89
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	**178.90**	**187.83**	**268.95**	**283.74**	**309.30**
a, Industri B/S	171.25	177.27	254.80	265.06	284.88
b, I K K R	209.63	230.24	325.79	358.76	407.42
4. LISTRIK & AIR MINUM	**246.57**	**266.15**	**350.86**	**385.46**	**423.95**
a. Listrik	279.13	288.68	371.38	407.16	447.84
b. Air Minum	216.07	245.04	331.63	365.12	401.56
5. BANGUNAN	**353.29**	**414.33**	**653.51**	**830.26**	**1,020.50**
6. PERDAGANGAN, HTL & REST.	**278.58**	**334.86**	**366.49**	**425.11**	**490.77**
a, Perdagangan Besar & Eceran	280.23	337.68	369.64	429.34	496.23
b, Hotel	246.64	269.04	379.10	437.63	501.23
c, Restoran & Rumah Makan	249.62	286.90	302.50	339.45	380.95
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	**299.00**	**360.64**	**410.33**	**461.88**	**519.18**
a. Pengangkutan	303.59	367.04	416.54	469.18	527.60
1. Angkutan Darat	347.13	427.50	760.87	857.36	964.33
2. Angkatan Laut	288.74	345.83	288.33	325.91	367.10
3. Angkutan Udara	434.44	577.71	844.73	1,131.43	1,499.63
4. Jasa Penunjang Angkutan	278.96	336.18	446.12	460.82	477.17
b. Komunikasi	178.36	192.48	247.04	270.23	297.91
8, KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA	**283.26**	**333.09**	**344.46**	**377.30**	**417.68**
a.Bank	55.76	61.53	62.83	75.91	91.47

http://natunakab.bps.go.id

b.Lembaga Keuangan Bukan Bank	220.86	249.18	308.57	342.52	367.87
c. Sewa Bangunan	288.55	339.90	349.35	382.40	423.76
d. Jasa Perusahaan	234.43	236.82	218.92	233.03	244.11
9, JASA - JASA	**305.07**	**378.59**	**444.50**	**476.49**	**515.92**
a, Pemerintahan Umum	325.35	366.35	493.11	527.92	572.39
b. Swasta	257.86	306.08	331.37	356.81	384.53
1. Sosial Kemasyarakatan	532.79	697.18	813.39	880.83	955.16
2. Hiburan dan Rekreasi	286.50	340.94	371.33	397.35	426.11
3. Perorangan & Rumah tangga	163.50	173.55	168.90	181.02	193.85
PDRB	**315.23**	**346.14**	**379.14**	**414.35**	**454.56**

Catatan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 6. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN NATUNA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2006-2010

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009*	2010**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. PERTANIAN	**148.28**	**155.85**	**163.84**	**167.81**	**175.70**
a, Tanaman Bahan Makanan	116.19	118.88	123.38	128.07	133.06
b, Tanaman Perkebunan	130.97	136.17	136.21	136.25	136.57
c, Peternakan & Hasil- hasilnya	107.60	108.03	108.73	109.50	111.54
d, Kehutanan	120.35	123.16	126.58	130.13	133.85
e, Perikanan	154.57	163.14	86.19	182.16	191.85
2.PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	**116.53**	**130.57**	**143.26**	**157.29**	**171.81**
a, Pertambangan	-	-	-	-	-
b, Penggalian	116.53	130.57	143.26	157.29	171.81
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	**127.66**	**134.02**	**140.45**	**147.89**	**155.87**
a, Industri B/S	120.80	124.95	129.48	134.24	139.21
b, I K K R	155.24	170.46	187.65	206.64	227.58
4. LISTRIK & AIR MINUM	**116.04**	**120.12**	**124.54**	**128.92**	**133.48**
a. Listrik	120.14	123.89	128.00	132.27	136.96
b. Air Minum	112.20	116.59	121.30	125.87	130.31
5. BANGUNAN	**131.57**	**153.53**	**185.46**	**226.30**	**267.35**
6. PERDAGANGAN, HTL & REST.	**130.56**	**139.94**	**150.30**	**164.09**	**179.52**
a, Perdagangan Besar & Eceran	128.97	138.17	148.34	161.85	177.11
b, Hotel	158.73	172.46	187.64	206.23	226.81
c, Restoran & Rumah Makan	158.66	171.11	184.73	201.39	219.21
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	**144.60**	**157.73**	**172.21**	**194.55**	**213.49**
a. Pengangkutan	144.72	157.97	172.59	195.55	214.75
1. Angkutan Darat	168.98	186.60	206.60	228.98	252.15
2. Angkatan Laut	138.78	151.25	164.83	180.62	198.74
3. Angkutan Udara	174.75	196.17	221.44	250.73	283.63
4. Jasa Penunjang Angkutan	106.98	109.19	111.45	113.78	116.29
b. Komunikasi	141.40	151.44	162.26	173.99	187.65
8, KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA	**132.42**	**138.98**	**145.92**	**153.29**	**161.92**
a.Bank	31.82	34.71	39.07	44.43	50.62

http://natunakab.bps.go.id

b.Lembaga Keuangan Bukan Bank	115.51	118.98	122.56	127.61	132.91
c. Sewa Bangunan	134.31	141.05	148.18	155.91	164.75
d. Jasa Perusahaan	105.26	106.32	107.39	108.55	110.82
9, JASA - JASA	**132.27**	**143.57**	**151.07**	**160.45**	**169.23**
a, Pemerintahan Umum	133.83	147.74	156.13	165.19	174.82
b. Swasta	128.62	133.85	139.30	145.01	151.03
1. Sosial Kemasyarakatan	137.12	145.16	153.78	162.93	172.68
2. Hiburan dan Rekreasi	147.12	152.59	158.31	164.26	170.52
3. Perorangan & Rumah tangga	120.61	124.89	129.25	133.82	138.61
PDRB	**142.64**	**151.25**	**160.40**	**168.24**	**178.77**

Catatan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sangat Sementara

TABEL 7. INDEKS BERANTAI PDRB KABUPATEN NATUNA ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2006-2010

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009*	2010**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. PERTANIAN	**120.79**	**105.41**	**105.70**	**106.57**	**107.82**
a, Tanaman Bahan Makanan	114.27	103.46	103.61	104.06	107.03
b, Tanaman Perkebunan	110.63	105.22	105.08	100.17	102.67
c, Peternakan & Hasil- hasilnya	119.08	100.43	101.47	101.23	105.03
d, Kehutanan	116.56	102.37	103.14	103.90	105.01
e, Perikanan	122.02	105.79	106.28	107.84	108.63
2.PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	**116.25**	**115.41**	**110.59**	**111.68**	**112.31**
a, Pertambangan	-	-	-	-	-
b, Penggalian	116.25	115.41	110.59	111.68	112.31
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	**110.57**	**104.99**	**106.14**	**105.50**	**109.01**
a, Industri B/S	109.52	103.52	104.81	104.03	107.47
b, I K K R	114.13	109.83	110.55	110.12	113.57
4. LISTRIK & AIR MINUM	**116.58**	**107.94**	**104.56**	**109.86**	**109.99**
a. Listrik	119.40	103.42	103.47	109.63	109.99
b. Air Minum	113.34	113.41	105.74	110.10	109.98
5. BANGUNAN	**124.44**	**117.28**	**123.23**	**127.05**	**122.91**
6. PERDAGANGAN, HTL & REST.	**117.76**	**120.20**	**119.49**	**115.99**	**115.45**
a, Perdagangan Besar & Eceran	117.91	120.50	119.73	116.15	115.58
b, Hotel	114.46	109.08	110.09	115.44	114.53
c, Restoran & Rumah Makan	114.84	114.93	115.33	112.22	112.22
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	**120.33**	**120.61**	**117.73**	**112.57**	**112.40**
a. Pengangkutan	120.56	120.90	117.97	112.64	112.45
1. Angkutan Darat	123.42	123.15	121.67	112.68	112.48
2. Angkatan Laut	119.38	119.77	113.99	113.03	112.64
3. Angkutan Udara	128.90	132.98	133.28	133.94	132.54
4. Jasa Penunjang Angkutan	118.98	120.51	120.96	103.29	103.55

http://natunakab.bps.go.id

b. Komunikasi	110.79	107.92	107.99	109.39	110.24
8, KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA	**119.30**	**117.59**	**112.42**	**109.53**	**110.70**
a.Bank	109.49	110.35	111.69	120.83	120.49
b.Lembaga Keuangan Bukan Bank	114.31	112.82	112.87	111.00	107.40
c. Sewa Bangunan	119.51	117.80	112.42	109.46	110.82
d. Jasa Perusahaan	115.45	101.02	101.11	106.45	104.75
9, JASA - JASA	**122.74**	**124.10**	**107.87**	**107.20**	**108.28**
a, Pemerintahan Umum	123.71	112.60	105.16	107.06	108.42
b. Swasta	119.96	118.70	118.41	107.68	107.77
1. Sosial Kemasyarakatan	133.57	130.85	127.61	108.29	108.44
2. Hiburan dan Rekreasi	119.57	119.00	119.13	107.01	107.24
3. Perorangan & Rumah tangga	108.83	106.15	106.45	107.17	107.09
PDRB	**120.29**	**109.80**	**109.13**	**109.29**	**110.18**

Catatan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sangat Sementara

TABEL 8. INDEKS BERANTAI PDRB KABUPATEN NATUNA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2006-2010

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009*	2010**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. PERTANIAN	**106.07**	**105.11**	**105.12**	**104.90**	**104.70**
a, Tanaman Bahan Makanan	102.54	102.32	103.78	103.80	103.90
b, Tanaman Perkebunan	103.78	103.98	100.02	100.03	100.24
c, Peternakan & Hasil- hasilnya	100.40	100.40	100.65	100.71	101.86
d, Kehutanan	102.31	102.33	102.78	102.80	102.86
e, Perikanan	106.70	105.55	105.66	105.68	105.32
2.PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	**102.61**	**112.05**	**109.72**	**109.79**	**109.23**
a, Pertambangan	-	-	-	-	-
b, Penggalian	102.61	112.05	109.72	109.79	109.23
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	**104.34**	**104.98**	**105.26**	**105.50**	**109.01**
a, Industri B/S	103.22	103.44	103.62	104.03	107.47
b, I K K R	108.00	109.81	110.09	110.12	113.57
4. LISTRIK & AIR MINUM	**101.69**	**103.52**	**103.68**	**109.86**	**109.99**
a. Listrik	102.28	103.12	103.32	109.63	109.99
b. Air Minum	101.11	103.92	104.04	110.10	109.98
5. BANGUNAN	**105.52**	**116.69**	**120.79**	**127.05**	**122.91**
6. PERDAGANGAN, HTL & REST.	**103.70**	**107.18**	**107.40**	**115.99**	**115.45**
a, Perdagangan Besar & Eceran	103.51	107.13	107.36	116.15	115.58
b, Hotel	106.40	108.65	108.80	115.44	114.53
c, Restoran & Rumah Makan	106.45	107.85	107.96	112.22	112.22
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	**106.46**	**109.08**	**109.19**	**112.57**	**112.40**
a. Pengangkutan	106.47	109.15	109.26	112.64	112.45
1. Angkutan Darat	109.17	110.43	110.72	112.68	112.48

http://natunakab.bps.go.id

2. Angkatan Laut	105.64	108.98	108.98	113.03	112.64
3. Angkutan Udara	109.95	112.26	112.88	133.94	132.54
4. Jasa Penunjang Angkutan	101.19	102.06	102.07	103.29	103.55
b. Komunikasi	105.95	107.10	107.14	109.39	110.24
8, KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA	**104.94**	**104.95**	**104.99**	**109.53**	**110.70**
a.Bank	105.79	109.10	112.55	120.83	120.49
b.Lembaga Keuangan Bukan Bank	102.44	103.00	103.01	111.00	107.40
c. Sewa Bangunan	105.04	105.02	105.05	109.46	110.82
d. Jasa Perusahaan	100.87	101.01	101.01	106.45	104.75
9, JASA - JASA	**106.03**	**108.54**	**105.23**	**107.20**	**108.28**
a, Pemerintahan Umum	106.66	110.39	105.68	107.06	108.42
b. Swasta	104.52	104.07	104.07	107.68	107.77
1. Sosial Kemasyarakatan	106.26	105.87	105.94	108.29	108.44
2. Hiburan dan Rekreasi	106.69	103.72	103.75	107.01	107.24
3. Perorangan & Rumah tangga	103.18	103.55	103.50	107.17	107.09
PDRB	**105.62**	**106.04**	**106.05**	**106.38**	**106.25**

Catatan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sangat Sementara

TABEL 9. INDEKS IMPLISIT PDRB KABUPATEN NATUNA MENURUT LAPANGAN USAHA, 2006-2010

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009*	2010**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. PERTANIAN	**224.77**	**225.41**	**228.30**	**231.94**	**238.84**
a, Tanaman Bahan Makanan	191.57	193.72	193.41	193.89	199.73
b, Tanaman Perkebunan	263.67	266.83	280.33	280.71	287.50
c, Peternakan & Hasil- hasilnya	276.19	276.26	278.52	279.95	288.66
d, Kehutanan	216.01	216.10	216.85	219.17	223.75
e, Perikanan	223.15	223.65	224.96	229.55	236.76
2.PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	**211.03**	**217.36**	**219.09**	**222.85**	**229.14**
a, Pertambangan	-	-	-	-	-
b, Penggalian	211.03	217.36	219.09	222.85	229.14
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	**140.14**	**140.15**	**141.52**	**141.78**	**146.65**
a, Industri B/S	141.77	141.87	143.50	143.98	149.22
b, I K K R	135.04	135.07	135.64	135.64	139.87
4. LISTRIK & AIR MINUM	**212.49**	**221.57**	**223.27**	**236.87**	**251.63**
a. Listrik	232.33	233.01	233.35	247.56	262.98
b. Air Minum	192.58	210.17	213.59	226.64	240.76
5. BANGUNAN	**268.52**	**269.86**	**275.30**	**286.64**	**298.22**
6. PERDAGANGAN, HTL & REST.	**213.37**	**239.29**	**265.95**	**282.72**	**298.34**
a, Perdagangan Besar & Eceran	217.28	244.39	272.56	290.15	306.46
b, Hotel	155.38	156.00	157.85	165.79	172.65
c, Restoran & Rumah Makan	157.33	167.67	179.11	184.36	190.08

http://natunakab.bps.go.id

7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	**206.77**	**228.65**	**245.77**	**252.03**	**258.16**
a. Pengangkutan	209.77	232.35	250.97	257.27	263.44
1. Angkutan Darat	205.43	229.10	251.76	255.97	261.45
2. Angkatan Laut	208.05	228.65	239.17	246.70	252.55
3. Angkutan Udara	248.61	294.49	347.71	411.31	481.93
4. Jasa Penunjang Angkutan	260.75	307.89	364.85	369.15	374.02
b. Komunikasi	126.14	127.10	128.10	130.67	133.58
8, KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA	**213.90**	**239.67**	**256.43**	**267.02**	**279.84**
a.Bank	175.27	177.27	175.92	186.88	197.64
b.Lembaga Keuangan Bukan Bank	191.21	209.43	229.49	244.66	252.29
c. Sewa Bangunan	214.84	240.97	257.88	268.27	281.33
d. Jasa Perusahaan	222.72	222.75	222.97	234.81	240.94
9, JASA - JASA	**230.65**	**263.70**	**249.64**	**253.82**	**260.56**
a, Pemerintahan Umum	243.10	247.97	246.75	249.69	255.81
b. Swasta	200.48	228.67	260.20	269.14	278.48
1. Sosial Kemasyarakatan	388.57	480.28	578.52	591.30	605.02
2. Hiburan dan Rekreasi	194.74	223.44	256.56	264.59	273.32
3. Perorangan & Rumah tangga	135.57	138.97	142.93	147.96	152.97
PDRB	**221.00**	**228.85**	**234.65**	**241.05**	**249.96**

Catatan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sangat Sementara

TABEL 10. PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA PER KAPITA KABUPATEN NATUNA ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2006-2010

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009*	2010**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
PDRB (Juta rupiah)	1,360,238	1,493,609	894,734	977,821	1,077,392
Penyusutan (Juta rupiah)	30,189	33,149	19,858	21,702	23,911
PDRN Atas Dasar Harga Pasar (Juta rupiah)	1,330,049	1,460,460	874,877	956,119	1,053,481
Pajak Tak Langsung Netto (Juta rupiah)	46,912	51,512	30,858	33,723	37,157
PDRN Atas Dasar Biaya Faktor (Juta rupiah)	1,283,137	1,408,948	844,019	922,396	1,016,324

http://natunakab.bps.go.id

Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	93,963	101,340	60,796	61,978	69,003
Perkapita P D R B (rupiah)	14,476,313	14,738,591	14,716,995	15,776,901	15,613,704
Perkapita Pendapatan Regional (rupiah)	13,655,769	13,903,180	13,882,808	14,882,637	14,728,690

Catatan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sangat Sementara

http://natunakab.bps.go.id

TABEL 11. PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA PER KAPITA KABUPATEN NATUNA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000, 2006-2010

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009*	2010**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
PDRB (Juta rupiah)	615,491	652,664	381,313	405,647	431,019
Penyusutan (Juta rupiah)	13,660	14,485	8,463	11,277	11,982
PDRN Atas Dasar Harga Pasar (Juta rupiah)	601,831	638,179	372,851	394,370	419,037
Pajak Tak Langsung Netto (Juta rupiah)	21,227	22,509	13,151	13,910	14,780
PDRN Atas Dasar Biaya Faktor (Juta rupiah)	580,604	615,669	359,700	380,460	404,257

Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	93,963	101,340	60,796	61,978	69,003
Perkapita P D R B (rupiah)	6,550,354	6,440,335	6,272,015	6,545,018	6,246,384
Perkapita Pendapatan Regional (rupiah)	6,179,068	6,075,285	5,916,506	6,138,635	5,858,544

Catatan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sangat Sementara

http://natunakab.bps.go.id